



**KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**
NOMOR : W21- 673 .KP.03.03 TAHUN 2019
TENTANG

**PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI
DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
NUSA TENGGARA BARAT**

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan hasil rapat Tim Penilai Kinerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat, dipandang perlu melakukan pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang pemberhentian dan pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dari dan dalam jabatan Administrasi di Lingkungan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nusa Tenggara Barat;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2014, tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 Tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977, tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembara Negara Tahun 1977 No.11) sebagaimana telah beberapa kali dirubah dan terakhir dirubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2019;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2000 Tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2000 No.193);
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : 30 Tahun 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-85.KP.04.01 Tahun 2015 tanggal 25 Maret 2015 tentang Pemberian Kuasa untuk atas nama Menteri Hukum Dan Hak Asasi Manusia menandatangani keputusan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
7. Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : M.HH-48.KP.03.03 Tahun 2018 tanggal 30 November 2018 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Tinggi Pratama di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Memutuskan

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN DARI DAN DALAM JABATAN ADMINISTRASI DI LINGKUNGAN KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA NUSA TENGGARA BARAT.
- KESATU : Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam lajur 2, diberhentikan dari jabatan lamanya sebagaimana tersebut dalam lajur 4, diangkat dalam jabatan baru sebagaimana tersebut dalam lajur 5, serta diberikan tunjangan jabatan struktural sebesar sebagaimana tersebut dalam lajur 6 daftar lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KETIGA : Biaya perjalanan ke tempat tugas yang baru ditanggung oleh Negara, sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- KELIMA : Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Mataram
Pada tanggal 26 Juni 2019

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,



Drs. ANDI DAHRIF RAFIED, M.Si.
NIP. 19600912 198003 1 001



Tembusan :

1. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, u.p. Kepala Biro Kepegawaian;
3. Inspektur Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
4. Direktur Jenderal Imigrasi Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
5. Direktur Jenderal Pemasyarakatan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
6. Kepala Kantor Regional X BKN Denpasar;
7. Kepala Biro Keuangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;
8. Kepala Biro Perencanaan Kementerian Hukum dan HAM;
9. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan yang bersangkutan;
10. Kepala Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram;
11. Kepala Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar;
12. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram;
13. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Sumbawa Besar;
14. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompus;
15. Kepala Lembaga Pemasyarakatan Perempuan Kelas III Mataram;
16. Kepala Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sumbawa Besar;
17. Pembuat Daftar Gaji yang bersangkutan;
18. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : W21-673.KP.03.03 TAHUN 2019
TANGGAL : 25 Juni 2019

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1.	PANCAWATI, SH. 19720929 199403 2 001	Penata (III/c)	Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sumbawa Besar	Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sumbawa Besar	Eselon V tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 360.000,-
2.	FATAHOLLAH, S.Sos. 19651231 198803 1 003	Penata Tingkat I (III/d)	Kepala Sub Seksi Keamanan Lembaga Masyarakat Kelas IIA Sumbawa Besar	Kepala Sub Seksi Administrasi dan Pengelolaan Rumah Penyimpanan Benda Sitaan Negara Kelas II Sumbawa Besar	
3.	LALU BUDI SETIAWAN, S.H. 19890824 201012 1 003	PenataMuda (III/a)	Pelaksana Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram	Kepala Urusan Tata Usaha Lembaga Masyarakat Perempuan Kelas III Mataram	
4.	ARIS RESKI, S.Kom 19840612 200901 1 007	Penata (III/c)	Pelaksana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	Kepala Sub Seksi Teknologi Informasi Keimigrasian Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	
5.	MAULANA MALIK, A.Md 19870516 200912 1 005	Penata Muda (III/a)	Pelaksana Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	Kepala Urusan Keuangan Kantor Imigrasi Kelas II TPI Sumbawa Besar	
6.	DARWELLI, S.I.P. 19711231 199203 1 001	Penata (III/c)	Pelaksana Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	Kepala Urusan Kepegawaian Kantor Imigrasi Kelas I TPI Mataram	

NO	NAMA / NIP	PANGKAT / GOLONGAN	JABATAN LAMA	JABATAN BARU	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
7.	AHMAD, S.Sos. 19731231 199703 1 001	Penata (III/c)	Pelaksana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu	Kepala Sub Seksi Perawatan Napi / Anak Didik Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu	Eselon V tunjangan jabatan struktural sebesar Rp. 360.000,-
8.	MUSTAMIN 19690525 198803 1 001	Penata Muda Tingkat I (III/b)	Pelaksana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu	Kepala Sub Seksi Kegiatan Kerja Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIB Dompu	
9.	I NYOMAN AGUS SUKARMA ANTARA, A.Md.IP 19880905 200901 1 001	Pengatur Tingkat I (II/d)	Pelaksana Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram	Kepala Sub Seksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Perawatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas IIA Mataram	

a.n. MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH,



DRS. ANDI DAHRIF RAFIED, M.Si.
NIP. 19600912 198003 1 001

